

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT
PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN BARACK OBAMA DAN
PRESIDEN DONALD TRUMP DALAM ISU NUKLIR IRAN, 2009-2019**

(Skripsi)

Oleh

WINDY SEVIA WULANDARY

NPM 1716071055



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PERBANDINGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN BARACK OBAMA DAN PRESIDEN DONALD TRUMP DALAM ISU NUKLIR IRAN, 2009-2019

Oleh

WINDY SEVIA WULANDARY

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump dalam isu nuklir Iran tahun 2009-2019. Sejak putusya hubungan diplomatik dengan Iran, Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi terhadap aktivitas nuklir Iran. Pada masa pemerintahan Obama, ia mampu membuat Iran tergabung dalam kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang mengatur aktivitas program nuklir Iran. Namun, Trump justru memutuskan untuk keluar dari kesepakatan tersebut dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada riset *historical comparative*. Teori yang digunakan ialah Kebijakan Luar negeri dengan menganalisis instrumen kebijakan luar negeri serta menggunakan Perbandingan Kebijakan Luar Negeri dengan metode *single-country*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama dan Trump dalam isu nuklir Iran yaitu sama-sama menerapkan sanksi ekonomi. Namun keduanya memiliki perbedaan pada tujuan, yang mana Obama bertujuan untuk mengurangi intensitas Iran dalam mengembangkan nuklir sedangkan Trump bertujuan untuk menanggukhan program nuklir Iran. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh Obama didominasi oleh instrumen sosialisasi dan koersif secara bersamaan sedangkan kebijakan yang dibuat oleh Trump cenderung hanya menggunakan instrumen koersif.

Kata kunci : nuklir Iran, sanksi ekonomi, instrumen, kebijakan Obama, kebijakan Trump

ABSTRACT

A COMPARATIVE OF U.S FOREIGN POLICY UNDER THE PRESIDENT BARACK OBAMA AND THE PRESIDENT DONALD TRUMP ADMINISTRATION TOWARD IRANIAN NUCLEAR ISSUES, 2009-2019

By

WINDY SEVIA WULANDARY

The aims of the research were to get the comparative of United States's foreign policy under the President Barack Obama and the President Donald Trump administration toward Iranian nuclear issues. Since the finished over diplomatic relation with Iran, United States give the economic sanction toward Iran's nuclear activities. Obama is capable to get Iran to join the JCPOA or Joint Comprehensive Plan of Action which regulates Iran's nuclear activities. But, Trump decide to leave the agreement and reimpose economic sanction toward Iran. This research adopts qualitative approach that emphasizes historical comparative research. The theory used of this research were Foreign Policy that analyzing an instrument of foreign policy and Comparative Foreign Policy that use single-country method. The result the research were show that both Obama and Trump have a similarity on their foreign policy to Iran which use economic sanction. But, they have different goals, which Obama to reduce the intensity of Iran's nuclear activities and Trump to suspend Iran's nuclear program. Last, United States's foreign policy under the President Obama administration dominated by socialization and coercive instrument and the President Trump administration dominated by coercive instrument.

Key words : Iran's nuclear, economic sanction, instrument, Obama's policy, Trump's policy

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT
PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN BARACK OBAMA DAN
PRESIDEN DONALD TRUMP DALAM ISU NUKLIR IRAN, 2009-2019**

Oleh

WINDY SEVIA WULANDARY

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi:

PERBANDINGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN BARACK OBAMA DAN PRESIDEN DONALD TRUMP DALAM ISU NUKLIR IRAN, 2009-2019

Nama Mahasiswa

Windy Sevia Wulandary

Nomor Pokok Mahasiswa

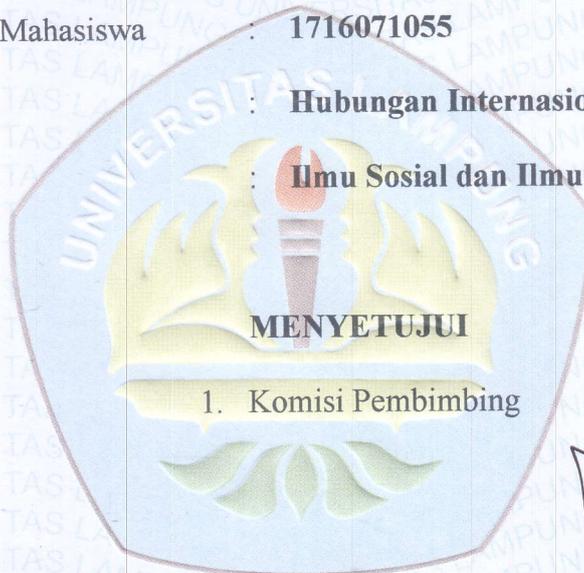
1716071055

Jurusan

Hubungan Internasional

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP. 197912302014041001

Astiwi Inayah, S.IP., M.A.
NIP. 199105022020122020

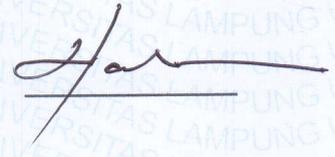
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 196004161986032002

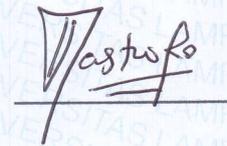
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

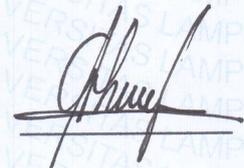
Ketua : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**



Sekretaris : **Astiwi Inayah, S.IP., M.A.**



Penguji : **Gita Karisma, S.IP., M.Si.**



2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dra. Ida Nurhaidah, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **18 Agustus 2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung, 35145
Telepon / Fax. (0721)704626 Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id>



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, September 2021
Yang membuat pernyataan,



Windy Sevia Wulandary
NPM 1716071055

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Banuayu, Sumatera Selatan pada 24 September 1999, sebagai anak pertama dari bapak Ledi Irawan dan Ibu Marli Marleni. Penulis merupakan kakak pertama dari dua orang adik yang bernama Icha Agnes dan Marchel Faifu.

Penulis menempuh pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Lematang Lestari dan melanjutkan Sekolah Dasar di SD Lematang Lestari yang kemudian pindah ke SD Negeri 20 Kota Prabumulih. Pendidikan formal selanjutnya ialah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prabumulih dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prabumulih yang diselesaikan pada tahun 2017.

Pertengahan tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis sempat mengikuti organisasi internal kampus yaitu Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UKPM) Teknokra dan menerbitkan beberapa tulisan di tabloid cetak Teknokra. Penulis juga tergabung dalam komunitas ARSA dan menjadi bagian dari divisi media. Pada tahun 2020, penulis melakukan kegiatan magang di organisasi non-profit Wahana Lingkungan Hidup Lampung (WALHI) dan menjadi pembicara dalam kegiatan webinar nasional terkait perubahan iklim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump Dalam Isu Nuklir Iran, 2009-2019”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra.Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung
3. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan ilmu, waktu, masukan, bimbingan, nasihat serta motivasi kepada penulis.
4. Mba Astiwi Inayah, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang sudah memberikan ilmu, waktu, masukan, bimbingan, nasihat serta motivasi kepada penulis.
5. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembahas sekaligus Dosen Penguji yang sudah memberikan ilmu, waktu, saran serta masukan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional beserta Staf Jurusan atas ilmu, bantuan dan pengalaman yang diberikan kepada penulis.

7. Keluarga Cemara. Ayah, ibu dan adik-adik yang sudah memberikan segalanya kepada penulis. Tidaklah cukup sanwacana ini untuk menuliskan segala kebaikan kalian, biarlah doa yang kupanjatkan kepada Tuhan untuk kalian.
8. Kepada Cassey, Chaca dan Chici yang sudah menjadi penyemangat bagi penulis untuk lebih rajin lagi agar kalian bisa hidup dengan nyaman dan berkecukupan.
9. Mas Arif Ramadhan sebagai teman dalam segala hal. Terima kasih sudah menjadi orang baik dan memberikan energi positif kepada penulis.
10. Muthia Shabrina, terima kasih atas segala hal baik yang diberikan kepada penulis. Kepada teman-teman lainnya, Auk, Bela, Hani, Nadya, Dinda, Ezra, Indah dan Febie yang sudah memberikan banyak hal kepada penulis.
11. Teman-teman Jurusan Hubungan Internasional dan semua pihak yang sudah membantu penulis.

Bandar Lampung, September 2021

Penulis,

Windy Sevia Wulandary

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Keilmuan.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teoritis.....	15
2.2.1 Kebijakan Luar Negeri.....	15
2.2.2 Perbandingan Kebijakan Luar Negeri.....	18
2.3 Kerangka Berpikir.....	20
METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian.....	22
3.2 Fokus Penelitian.....	23

3.3 Jenis dan Sumber Data	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	24
3.5 Teknik Analisis Data	24

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil	26
4.1.1 Program Nuklir Iran	26
4.1.2 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Isu Nuklir Iran Pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama 2009-2016.....	35
4.1.3 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Isu Nuklir Iran Pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump 2016-2019.....	42
4.2 Pembahasan.....	49
4.2.1 Perbandingan Instrumen Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump.....	49

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4. 1 Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Obama dan Trump.....	47
Tabel 4. 2 Perbandingan Instrumen Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama dan Trump.....	60
Tabel 4. 3 Perbandingan Tujuan, Cara dan Hasil dari Kebijakan Obama dan Trump terhadap Isu Nuklir Iran	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Metode Perbandingan Politik	18
Gambar 2. 2 Bagan Kerangka Berpikir	21

DAFTAR SINGKATAN

AEOI	: Atomic Energy Organization of Iran
CIDAA	: Countering Iran's Desabilizing Activities
CISADA	: Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act
IAEA	: International Atomic Energy Agency
ITSR	: Iranian Transactions and Sanctions Regulation
JCPOA	: Joint Comprehensive Plan of Action
JPOA	: Joint Plan of Action
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
NPT	: Non-Proliferation Treaty
NSPM-11	: National Security Memorandum-11
OFAC	: Office of Foreign Asset Control
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SDN	: Specially Designated Nationals

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Studi Hubungan Internasional, kepentingan nasional merupakan hal fundamental bagi suatu negara. Ketika kepentingan nasional suatu negara bertujuan untuk mengejar *power* yang kemudian dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, maka konsekuensi dalam sistem internasional akan memunculkan suatu kompetisi, perimbangan kekuasaan, konflik atau bahkan perang.¹ Pada dasarnya, setiap negara pasti mempunyai kepentingan nasional dan keinginan untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik.² Namun pada kenyataannya, kepentingan suatu negara kerap berbanding terbalik dengan kepentingan negara lain sehingga menimbulkan gesekan antar aktor negara yang kemudian menyebabkan renggangnya hubungan diplomatik antar negara terkait.

Salah satu contoh perbedaan kepentingan nasional yang berakhir pada renggangnya hubungan diplomatik dapat dilihat pada hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran. Sebelum berada pada puncak terburuk hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, keduanya sempat memiliki hubungan yang baik pada saat Iran dipimpin oleh Shah Reza Pahlevi. Pada saat itu juga, Amerika Serikat beserta sekutunya sempat mendukung program nuklir Iran karena hal tersebut dapat memberikan Iran tenaga listrik. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, salah

¹ Arry Bainus dan Junita Budi Rachman. *Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional*. Journal of International Studies. Vol 2. No.2. Mei 2018. Hlm 109. Diakses melalui <http://intermesticjournal.fisip.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/download/74/34/> pada 20 Oktober 2020

² Setyo Widagdo dan Hanif Widhiyanti. *Hukum Diplomati dan Konsuler*. Malang. Bayu Media Publishing. 2008. Hlm 56

satu penyebab hancurnya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran ialah adanya perbedaan kepentingan. Pada saat itu Amerika Serikat terlibat secara langsung dalam kudeta tahun 1953 yang menyebabkan jatuhnya perdana menteri Iran Mohammad Mosaddeq.³ Akibatnya, Iran memutuskan untuk menjalankan program nuklirnya tanpa bantuan Amerika Serikat.

Setelah memutuskan perjanjian tentang reaktor nuklir dengan Amerika Serikat, Iran mulai serius dalam program nuklirnya. Sebagai langkah awal, Iran memulai program pengayaan uranium dengan tujuan untuk mendapatkan kemampuan siklus bahan bakar nuklir serta untuk mengisi bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir dan bom atom. Iran juga berkomitmen untuk mengupayakan cara-cara damai dalam mengembangkan energi nuklir agar tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah. Keikutsertaan Iran dalam berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang non-proliferasi merupakan tindakan Iran untuk memastikan bahwa tujuannya mengembangkan nuklir tidak ditafsirkan provokatif dan ambisius.⁴

Upaya lain untuk menunjukkan keseriusan Iran dalam pengembangan program nuklirnya ialah dengan menandatangani perjanjian nuklir serta membangun organisasi nuklir. Memasuki tahun 1970, Iran mulai meratifikasi NPT atau Non-Proliferation Treaty. Dengan adanya ratifikasi tersebut, maka akan ada pembatasan terhadap pengembangan nuklir Iran dan juga pengawasan terkait nuklir Iran yang diawasi secara keseluruhan oleh Badan Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA). Pada tahun yang sama, Iran mendirikan Organisasi Energi Atom Iran atau Atomic Energy Organization of Iran (AEOI). Iran yang semakin tertarik dengan nuklir memulai pekerjaan dengan desain pada reaktor air ringan pertama yang diproduksi di dalam negeri. Ketertarikan Iran terhadap nuklir semakin diperkuat setelah adanya ledakan minyak sehingga

³ Kumuda Simpson. *U.S Nuclear Diplomacy with Iran: From the War on Terror to the Obama Administration*. New York. Rowman and Littlefield. 2016. Hlm 5

⁴ Ghandikotasivamala Ramesh dan Kebede Tsegaye. *Iran's Nuclear Program*. Artikel dipublikasi pada 30 Desember 2011. Hlm 4

Mohammad Reza Pahlevi tiba-tiba memutuskan untuk menjadikan energi nuklir sebagai prioritas pemerintahannya.⁵

Meskipun Iran sudah meratifikasi NPT dan terus menegaskan bahwa pengembangan nuklirnya bertujuan damai, namun tetap saja Amerika Serikat berpendapat bahwa Iran akan mengujarnya dalam kemampuan produksi senjata nuklir.⁶ Hal tersebut diperkuat ketika tahun 2002 ada pihak oposisi Iran yang melaporkan kepada Amerika Serikat bahwa terdapat fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan sebuah pabrik air berat di Arak. Sebagai badan pengawas atom internasional, IAEA melakukan pemeriksaan terhadap Iran dan hasilnya ialah IAEA menyatakan bahwa Iran sudah melanggar NPT.⁷ Setelah adanya pemeriksaan tersebut, IAEA meminta Iran untuk lebih terbuka atas informasi pengayaan uranium serta memintanya untuk menghentikan kegiatan pengembangan nuklir. Namun hal tersebut diabaikan oleh Iran yang mengeluarkan kebijakan terkait penentangan permintaan IAEA serta melepaskan segel larangan dan melanjutkan pengembangan fasilitas pengayaan uranium di Natanz.⁸ Menanggapi hal tersebut, dalam pidato kenegaraan Presiden George W. Bush menggambarkan Iran sebagai bagian dari poros kejahatan karena mengejar senjata pemusnah massal secara agresif.⁹

Perjalanan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Iran tidak terlepas dari adanya sanksi ekonomi yang dimulai pada tahun 1979. Dalam kerangka studi Hubungan Internasional, sanksi ekonomi merupakan kebijakan dalam memberikan hukuman pada negara lain yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara tindakan yang dilakukan satu negara dengan harapan dari

⁵ Ali Vaez dan Karim Sadjadpour. *Iran's Nuclear Odyssey: Cost and Risk*. Washington. Carnegie Endowment for International Peace. 2013. Hlm 4

⁶ Paul K. Kerr. *Iran's Nuclear Program: Status*. Congressional Research Service. 2009. Hlm 2. Diakses melalui <https://bit.ly/3ettT8W> pada 9 November 2020

⁷ Ted R and Alia, C. *Major Milestones of Iran's Nuclear Programme*. Artikel dibuat pada November 2018. Diakses melalui <https://www.aljazeera.com/news/2018/11/5/major-milestones-of-irans-nuclear-programme> pada 9 Februari 2021

⁸ Nuclear Threat Initiative. *Natanz Enrichment Complex*. Artikel dibuat pada Juli 2017 dan diakses melalui <https://www.nti.org/learn/facilities/170/> pada 20 November 2020

⁹ CFR.Org. *U.S Relations With Iran: 1953-2020*. Diakses melalui <https://www.cfr.org/timeline/us-relations-iran-1953-2020> pada 9 Februari 2021

negara lainnya.¹⁰ Bagi Amerika Serikat, masalah nuklir Iran menyangkut keamanan sehingga tujuan dari kebijakan Amerika Serikat ialah untuk mencapai kepentingan keamanan yang maksimal dengan membatasi kemungkinan dan kapasitas Iran untuk menciptakan senjata nuklir.¹¹ Namun tindakan Iran yang terus mengembangkan program nuklir serta menolak untuk memberikan transparansi membuat Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi. Amerika Serikat membuat sanksi yang bertujuan untuk melemahkan Iran secara finansial sehingga akan mencegahnya dalam mengembangkan program nuklir.¹² Upaya pemberian sanksi oleh Amerika Serikat dilakukan melalui hubungan bilateral kedua negara serta beberapa sanksi di bawah PBB. Pemberian sanksi ekonomi terus dijaga oleh setiap pemimpin Amerika Serikat termasuk oleh Barack Obama dan Donald Trump.

Pada saat awal terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat, ia melakukan berbagai upaya untuk mendorong Iran agar terlibat dalam dialog diplomatik tentang program nuklir Iran. Hal tersebut dilakukan melalui tindakan substantif pertama Obama yang mengirimkan perwakilan Amerika Serikat untuk berbicara langsung dengan perwakilan Iran.¹³ Selain itu, Obama juga berencana untuk mengubah arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam merespon isu nuklir Iran. Kebijakan yang dibuat oleh Obama akan bergantung pada tindakan yang dilakukan oleh Iran.

Pada Februari 2009 Iran mengumumkan bahwa mereka berhasil melakukan peluncuran satelit Omid yang merupakan satelit pertamanya. Hal tersebut menjadi kekhawatiran dunia internasional terutama Amerika Serikat.¹⁴ Menindaklanjuti

¹⁰ Achmad Ismail. *Sanksi Ekonomi dalam Tinjauan Politik dan Diplomasi Internasional: Resensi Buku*. Indonesian Perspective, Vol. 5 No.1, 112-117. Hlm 112

¹¹ Liangxiang Jin. *Analysis on Obama Administration's Policy Adjustment of Iranian Nuclear Issue*. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia). Vol. 4 No.2. Hlm 16. Diakses melalui <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19370679.2010.12023153> pada 24 Oktober 2020

¹² Fahimeh Behrang. *U.S. Foreign Policy Interest and Iran's Nuclear Program*. Saskatoon. University of Saskatchewan. 2012. Hlm 38

¹³ Ibid. Liangxiang Jin. Hlm 29

¹⁴ Arms Control Association. *Timeline of Nuclear Diplomacy with Iran*. Diakses melalui <https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Nuclear-Diplomacy-With-Iran> pada 4 Oktober 2020

pengumuman Iran, Obama dalam kepemimpinannya juga mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan berpartisipasi penuh dalam pembicaraan P5+1¹⁵ dengan Iran dan berkomitmen untuk membuat kebijakan berbeda dari pemerintahan sebelumnya yang mengharuskan Iran untuk mematuhi tuntutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pendekatan lainnya yang dilakukan oleh Obama dapat dilihat melalui pesannya kepada Iran pada 21 Maret 2009 yang menyebutkan bahwa nama Iran resmi menjadi Republik Islam Iran yang secara tidak langsung merujuk pada peradaban besar Persia yang bersejarah. Dan tentunya hal tersebut dapat diasumsikan sebagai penerimaan rezim Iran oleh Barack Obama.¹⁶

Pemilihan presiden di Iran menyebabkan Hassan Rouhani terpilih sebagai pemimpin baru yang lebih terbuka dengan negara barat. Tepat setelah tiga hari pelantikannya pada Agustus 2013, Rouhani menyerukan dimulainya kembali negosiasi dengan negara barat terkait program nuklir Iran. Melihat peluang untuk diadakannya negosiasi terkait isu nuklir Iran, Amerika Serikat mengupayakan komunikasi dengan pihak Iran sehingga pada September 2013 keduanya melakukan percakapan telepon yang merupakan kontak tingkat tinggi untuk pertama kalinya antara Amerika Serikat dan Iran.¹⁷ Setelah beberapa kali melakukan negosiasi, akhirnya pada 24 November 2013 ditandatangani kesepakatan sementara tentang program nuklir Iran yang dinamakan Joint Plan of Action. Kesepakatan sementara tersebut dibuat untuk membatasi program nuklir Iran dengan imbalan bantuan dari perdagangan internasional dan keringanan sanksi terhadap Iran.¹⁸ Kemudian Joint Plan of Action diimplementasikan secara resmi pada 20 Januari 2014. Setelah kesepakatan tersebut diimplementasikan, pihak-pihak yang terlibat mulai membicarakan kerangka kesepakatan lanjutan dan menghasilkan rangkaian

¹⁵ P5+1 adalah sebutan untuk negara yang terlibat dalam upaya diplomasi dengan Iran mengenai program nuklirnya. Negara P5+1 terdiri dari Amerika Serikat, Britania Raya, Tiongkok, Prancis dan Rusia yang merupakan negara anggota DKPBB serta tambahan satu negara yaitu Jerman.

¹⁶ Ibid. Fahimeh Behrang. Hlm 44

¹⁷ Milena Sterio. *President Obama's Legacy: The Iran Nuclear Agreement?*. Case W. Res. J. Int'l L. Vol 48, No.1 2016. Hlm 73

¹⁸ Reuters Staff. *Interim Nuclear Agreement Between Iran and Six Powers*. Diakses melalui <https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-agreement-text-idUSBRE9AN0FS20131124> pada 9 Februari 2021

negosiasi yang berlangsung selama tujuh belas hari di Wina. Sehingga pada Juni dan Juli 2015 menghasilkan perjanjian yang disebut Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai imbalan dari keringanan sanksi terhadap Iran dan ditandatangani pada 14 Juli 2015.

Memasuki tahun pergantian pemimpin Amerika Serikat, terjadi perubahan pada hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Selama masa kampanye, Donald Trump selalu menyebut bahwa JCPOA merupakan kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan.¹⁹ Sejak awal pemerintahannya, Trump sudah tegas menekankan bahwa Iran merupakan ancaman yang sah bagi negaranya dan ia berupaya untuk mengarahkan kebijakan Amerika Serikat untuk mengatasi rezim Iran yang juga dianggap sebagai ancaman dunia dengan senjata nuklirnya.²⁰ Sehingga Trump berupaya untuk menegosiasikan ulang JCPOA.

Pada tanggal 22 September 2017 Iran melakukan parade rudal balistik jarak menengah yang baru diuji pada bulan Januari dengan jarak tempuh 2.000 km.²¹ Merespon hal tersebut, Trump mengambil kebijakan untuk membatalkan sertifikasi terhadap JCPOA. Meskipun pembatalan tersebut tidak melanggar poin-poin dalam kesepakatan, namun Iran akan kembali diberi sanksi oleh Amerika Serikat. Selain itu, Trump juga mendorong Kongres untuk memberlakukan Undang-Undang yang mengatur tentang pembatasan tertentu kesepakatan program nuklir Iran.²²

Ketidakjelasan tentang kebijakan yang akan diambil dan perilaku negara anggota JCPOA yang sedikit bersebrangan membuat Amerika Serikat menolak semua jalur peluang Iran untuk memperoleh senjata nuklir dengan cara apapun.²³

¹⁹ Ibid. Arms Control Association. *Timeline of Nuclear Diplomacy with Iran*

²⁰ White House. *Remarks by President Trump on Iran Strategy*. Artikel dibuat pada 13 Oktober 2017. Diakses melalui <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-iran-strategy/> pada 4 Oktober 2020

²¹ Ibid. Arms Control. *Timeline of Nuclear Diplomacy with Iran*

²² Ibid. Arms Control. *Timeline of Nuclear Diplomacy with Iran*

²³ Anak Agung Banyu dan Muhammad Ilham Razak. *U.S Foreign Policy Towards Iranian Nuclear Threat from Bill Clinton to Donald Trump Administration*. Insignia Journal of International Relations Vol. 7 No.1 April 2020. Hlm 34

Sehingga Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir Iran pada 8 Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran. Dan dalam pidatonya di Sidang Umum PBB di New York, Trump menyatakan bahwa akan menambah sanksi terhadap Iran dan meminta semua negara untuk mengisolasi rezim Iran.²⁴

Adanya perbedaan dan persamaan antara kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Donald Trump dalam isu nuklir Iran membuat penulis tertarik untuk membandingkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat antar dua pemimpin tersebut. Berasal dari partai yang berbeda, keduanya mempunyai cara tersendiri untuk mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat dalam berbagai isu. Adanya asumsi yang menyatakan bahwa salah satu dari kedua pemimpin tersebut lebih baik dalam merumuskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap isu nuklir Iran juga membuat penulis tertarik untuk melakukan perbandingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat namun bukan untuk membandingkan kebijakan mana yang lebih baik tetapi untuk melihat pola kebijakan yang dibuat serta melihat instrumen kebijakan luar negeri apa yang digunakan oleh Obama dan Trump.

1.2 Rumusan Masalah

Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran sudah terjalin sejak lama. Awalnya kedua negara tersebut memiliki hubungan diplomatis yang baik namun pada akhirnya keduanya bersitegang akibat dari kebijakan Iran yang terus mengembangkan program nuklirnya. Berkaitan dengan hal itu, setiap pemimpin Amerika Serikat memiliki gaya kepemimpinan dan model kebijakan yang berbeda-beda dalam merespon isu nuklir Iran. Berasal dari partai yang berbeda, Barack Obama dan Donald Trump sama-sama tetap mempertahankan kepentingan nasional Amerika Serikat. Namun keduanya cenderung menggunakan pendekatan yang berbeda dalam merumuskan suatu kebijakan. Berdasarkan latar belakang yang telah

²⁴ Ibid. Arms Control. *Timeline of Nuclear Diplomacy with Iran*

dipaparkan sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Bagaimana perbandingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump dalam isu nuklir Iran, 2009-2019?*

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kebijakan nuklir Iran.
2. Mendeskripsikan kebijakan Barack Obama dan Donald Trump dalam isu nuklir Iran
3. Membandingkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump dalam isu nuklir Iran pada tahun 2009-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Keilmuan

Menyediakan informasi mengenai instrumen, ciri dan pola dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap isu nuklir Iran pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump tahun 2009-2019.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Menjadi rujukan bagi pengembangan mengenai topik perbandingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dibuat oleh Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump dalam isu nuklir Iran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam isu nuklir Iran dan juga penulis akan membandingkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Donald Trump tahun 2009-2019. Untuk mendukung penelitian dan melihat dari sudut pandang yang berbeda mengenai topik ini, maka penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

Penelitian pertama adalah jurnal yang berjudul *The US Policy of Containing Iran- from Obama to Trump 2009-2019* oleh Ayman Saleh Albarasneh dan Dania Koleilat Khatib yang dipublikasi pada 14 Desember 2019.²⁵ Penelitian tersebut menjelaskan mengenai analisis terkait kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran mulai dari tahun 2009-2018. Pada penelitian tersebut juga membahas mengenai berbagai faktor dan variabel yang menentukan kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump. Selain itu tulisan tersebut menjelaskan mengenai cara-cara dan pendekatan yang dilakukan oleh Barack Obama dan Donald Trump dalam membatasi Iran mengembangkan program nuklirnya.

²⁵ Ayman Saleh Albarasneh dan Dania Koleilat Khatib. *The US Policy of Containing Iran- from Obama to Trump 2009-2019*. Global Affair Journal. Routledge. Diakses melalui <https://doi.org/10.1080/2334046.0.2019.1701951> pada 8 Desember 2020

Ayman dan Daniah menjelaskan bahwa kedua pemimpin tersebut sama-sama menggunakan sanksi dalam membatasi Iran mengembangkan nuklirnya. Namun pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, ia menekankan pada diplomasi dan pemulihan hubungan dengan Iran. Namun meskipun Obama akan memulai hubungan diplomatik dengan Iran, bukan berarti ia akan menerima program pengembangan nuklir Iran. Oleh karena itu, Obama menciptakan strategi jalur ganda yang mengintegrasikan diplomasi dan sanksi secara bersamaan. Berbeda dengan Obama, Trump justru sering mengancam penargetan militer terhadap Iran. Pada masa pemerintahannya, Trump justru menggeser kebijakan Obama yang memulai hubungan dengan Iran melalui kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA. Trump menganggap bahwa kesepakatan tersebut akan menghalangi Amerika dalam membatasi Iran mengembangkan program nuklir.

Penelitian tersebut berorientasi pada eksplanasi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Barack Obama dan Donald Trump dalam isu nuklir Iran dari tahun 2009-2018. Sehingga perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak penulis lakukan ialah terletak pada fokus penelitian yang mana pada penelitian ini tidak hanya menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Obama dan Trump namun lebih mengarah pada perbandingan kebijakan yang dibuat oleh Obama dan Trump dilihat dari tolak ukur dalam analisis kebijakan luar negeri.

Penelitian kedua berjudul *American Attitude Towards Iran and Reflection on Iran Policy Toward the Arab Region* dan ditulis oleh Athbi Zaid Khalaf dari Department of Political Science, Universitas Kairo.²⁶ Tulisan yang diterima pada tahun 2020 ini membahas mengenai perubahan yang terjadi dalam politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran dengan fokus pada masa pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump.

Menurut Athbi, Barack Obama dalam memimpin Amerika Serikat sangat berlandaskan visi kebijakan luar negeri yang moderat dan fleksibel yang didasarkan

²⁶Athbi Zaid Khalaf. *American Attitude Towards Iran and It's Reflection on Iran Policy Towards the Arab Region*. Journal Departement of Political Science. Cairo University. Diakses melalui <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/REPS-09-2019-0119/full/pdf> pada 8 Desember 2020

pada kerja sama. Ia melihat bahwa kepentingan Amerika Serikat membutuhkan gagasan untuk mengubah arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari yang mendukung intervensi militer menjadi negara yang menggunakan *soft power* dan alat-alat diplomatik dengan tujuan untuk memulihkan sekutu dan menghadapi musuh. Obama juga berusaha menutup celah berbagai kebijakan yang cenderung berkonflik. Akibatnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama mengecualikan opsi-opsi militer dan berupaya membuka jalur diplomasi dengan berbagai musuh contohnya Iran. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam membuat kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan Iran, maka Obama mengikuti prinsip '*Diplomacy First*' yang ia promosikan pada masa kampanye untuk menjadi dasar atas berbagai kebijakan luar negerinya. Maka dari itu, apa yang Obama lakukan mungkin akan berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang menolak atau mencegah komunikasi dengan Teheran sebagai bentuk tekanan terhadap sistem Iran.

Berbeda dengan Obama, Donald Trump membawa tren baru dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Berangkat dari slogan kampanyenya '*American First*', tentu kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump akan mementingkan urusan internal Amerika Serikat. Sehubungan dengan hal itu, apa yang menjadi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran pada masa pemerintahan Trump mengacu pada penyerangan-penyerangan terhadap Iran dan menuduhnya mensponsori terorisme dengan memberikan uang dan senjata serta tindakan Iran yang terus melakukan pengembangan sistem misil jarak jauhnya. Selain itu, Trump juga mengumumkan penarikan dari kesepakatan nuklir Iran dan diikuti pengumuman sanksi ekonomi terhadap Iran.

Penelitian ketiga ditulis oleh Claudia Castiglioni dengan judul *Obama's Policy Toward Iran: Comparing First and Second Term*.²⁷ Penelitian yang ditulis pada tahun 2013 ini menjelaskan mengenai kebijakan Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama yang tidak membalikan arah kebijakan pemerintahan sebelumnya namun Obama juga tetap menentang segala persenjataan

²⁷ Claudia Castiglioni. *Obama's Policy Toward Iran: Comparing First and Second Term*. Journal Analysis No. 220. 2013. Diakses melalui https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_220_2013.pdf pada 8 Desember 2020

nuklir Iran dan mempertegas niatnya untuk melakukan hal-hal yang dapat mencegah Iran mengembangkan nuklir. Claudia menjelaskan bahwa setelah terpilihnya Obama menjadi presiden, ia akan menggunakan cara-cara yang lebih diplomatis dalam menyikapi Iran. Claudia menjelaskan bahwa dalam menyikapi Iran, Obama menggunakan pendekatan jalur ganda atau *dual track strategy* dengan menggunakan diplomasi dan sanksi secara bersamaan.

Tujuan dari penelitian Claudia ialah untuk menganalisis strategi dan hasil dari pendekatan Obama ke Teheran dari tahun 2009 sampai dengan masa jabatan yang kedua. Menurut Claudia, dengan mempertimbangkan dampak faktor-faktor regional dan domestik maka akan berpengaruh pada evolusi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hasil yang didapatkan Claudia dalam penelitiannya ialah pada tahun 2009 Obama tidak menunjukkan ketegasan dalam menanggapi isu nuklir Iran dan kendala-kendala yang mempengaruhi tindakan Iran dapat dijadikan variabel bagi Obama dalam suatu negosiasi. Perbedaan penelitian Claudia dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah terletak pada unit analisis karena pada penelitian Claudia hanya menganalisis mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama saja dalam isu nuklir Iran.

Penelitian keempat adalah tulisan dari Riccardo Alcaro dengan judul *All Is Not Quiet on the Western Front Trump's Iran Policy and Europe's Choice on the Nuclear Deal*.²⁸ Dalam penelitiannya, Riccardo menuliskan bahwa setelah perjanjian nuklir 2015, hubungan Amerika Serikat dan Iran tidak membaik seperti hubungan Eropa dan Iran yang sudah melakukan perdagangan bilateral. Justru Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Donald Trump telah mengarahkan kebijakan luar negeri dengan pola tradisional antagonisme yang keras terhadap Iran. Selain itu, dijelaskan bahwa alasan dibalik perilaku Amerika Serikat terhadap Iran tidak lain karena gaya kepemimpinan Donald Trump. Riccardo secara tegas menjelaskan bahwa terdapat tiga pilar dalam kebijakan Trump terhadap Iran yaitu (a) delegitimasi, kunci utama dari strategi tersebut ialah narasi bahwa pengembangan program rudal balistik Iran berkaitan dengan sponsornya terhadap

²⁸ Riccardo Alcaro. *All Is Not Quiet on the Western Front: Trump's Iran Policy and Europe's Choice on the Nuclear Deal*. Instituto Affari Internazionali. Diakses melalui <http://www.jstor.com/stable/resrep17537> pada 8 Desember 2020

kelompok-kelompok yang termasuk dalam organisasi teroris; (b) sanksi, merupakan komponen kedua dari kebijakan Donald Trump dalam mengurangi ruang gerak Iran dan yang terakhir; (c) penahanan, yang berkaitan dengan pengaruh Iran di Teluk. Sejak Amerika Serikat meninggalkan Irak, pengaruh Iran telah meningkat sejak 2011. Sehingga dengan kembalinya Amerika ke Irak maka akan mengimbangi pengaruh Iran di Irak. .Letak perbedaan penelitian Riccardo dan penelitian yang akan penulis lakukan juga terletak pada unit analisis karena Riccardo hanya membahas mengenai kebijakan pada masa Trump dalam isu nuklir Iran sedangkan penulis menambahkan kebijakan pada masa Obama sebagai komparasi antara dua pemimpin Amerika Serikat tersebut.

Demikianlah empat penelitian terdahulu yang sudah ditulis oleh beberapa peneliti yang relevan dalam membandingkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump dalam isu nuklir Iran. Berikut ini adalah tabel ringkasan dari kelima penelitian tersebut:

Indikator	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4
Judul	<i>The US Policy of Containing Iran- from Obama to Trump 2009-2018</i>	<i>American Attitude Towards Iran and Reflection on Iran Policy To ward the Arab Region</i>	<i>Obama's Policy Toward Iran: Comparing First and Second Term</i>	<i>All Is Not Quiet on the Western Front Trumps's Iran Policy and Europe's Chioce on the Nuclear Deal</i>
Penulis	Ayman Saleh Albarasneh dan Dania Koleilat Khatib	Athbi Zaid Khalaf	Claudia Catiglioni	Riccardo Alcaro
Tujuan Penelitian	Untuk mendeskripsikan kebijakan Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Obama dan Trump dalam isu nuklir Iran tahun 2009-2018	Untuk mendeskripsikan perubahan yang terjadi dalam politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran pada masa pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump.	Untuk menganalisis strategi dan hasil dari pendekatan Obama ke Teheran dari tahun 2009 sampai dengan masa jabatan yang kedua.	Untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Donald Trump dalam membatasi Iran mengembangk an nuklir
Fokus Penelitian	Kebijakan Amerika Serikat pada masa	Perbedaan antara kebijakan luar negeri	Kebijakan Amerika Serikat pada	Amerika Serikat pada masa

	pemerintahan Obama dan Trump untuk membatasi Iran dalam mengembangkan program nuklirnya	Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump terhadap Iran dan	masa pemerintahan Obama dalam isu nuklir Iran menggunakan pendekatan jalur ganda; sanksi dan diplomasi.	kepemimpinan Donald Trump telah mengarahkan kebijakan luar negeri dengan pola tradisional antagonisme yang keras terhadap Iran
Hasil Penelitian	Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Obama yang tenang dan cenderung mengedepankan diplomasi dan sanksi secara bersamaan sedangkan Donald Trump yang menolak berbagai kerja sama dengan Iran karena khawatir akan menghalangi Amerika dalam membatasi pengembangan nuklir Iran	Perubahan kebijakan luar negeri Amerika terhadap Iran merupakan akibat dari pergantian kepemimpinan Amerika dari Obama menjadi Trump. Perubahan kebijakan Amerika tersebut menyebabkan terjadinya perubahan trend politik luar negeri Iran terhadap kawasan Arab dalam hal peran regional Iran.	Hasil yang didapatkan Claudia dalam penelitiannya ialah pada tahun 2009 Obama tidak menunjukkan ketegasan dalam menanggapi isu nuklir Iran dan kendala-kendala yang mempengaruhi tindakan Iran dapat dijadikan variabel bagi Obama dalam suatu negosiasi.	Terdapat tiga pilar dalam kebijakan Trump terhadap Iran yaitu delegitimasi, sanksi serta penahanan
Perbedaan Penelitian	Terletak pada fokus penelitian yang hanya menjelaskan mengenai pendekatan dan kebijakan yang dibuat oleh Obama dan Trump tanpa memperhatikan tolak ukur kebijakan luar negeri	Terdapat perbedaan pada pertanyaan yang berisi bagaimana dampak dari pergeseran sikap Amerika terhadap Iran dan kebijakan Iran di kawasan Arab	Terletak pada unit analisis yang membahas mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap isu nuklir Iran pada masa Barack Obama	Terletak pada unit analisis yang membahas mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap isu nuklir Iran pada masa Obama Donald Trump

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang sudah penulis rangkum sebelumnya merupakan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan penulis lakukan. Misalnya pada penelitian terdahulu yang pertama membahas mengenai perbandingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Obama dan Presiden Trump dan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah terletak pada fokus penelitiannya. Sedangkan pada penelitian terdahulu yang kedua terdapat perbedaan pada pertanyaan penelitiannya. Dan untuk penelitian ketiga dan keempat akan berfokus pada kebijakan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump sehingga dapat dijadikan referensi penelitian terdahulu karena perbedaannya terletak pada masing-masing penelitian yang menjelaskan satu sisi dari kedua pemimpin Amerika Serikat tersebut dan dianggap relevan untuk bahan pada penelitian yang akan penulis lakukan.

2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan merupakan alat yang digunakan negara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.²⁹ Selain itu, kebijakan luar negeri terdiri dari tujuan, nilai-nilai yang ditetapkan, keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil oleh negara dan pemerintah nasional yang bertindak atas nama mereka, dalam konteks hubungan eksternal masyarakat internasional.³⁰ Menurut Morin dan Paquin, kebijakan luar negeri dapat didefinisikan oleh kriteria geografis dan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh otoritas politik dalam konteks di luar batas negara. Yang kemudian, transisi dari internal ke eksternal memberikan kekhususan pada kebijakan luar

²⁹ Glenn Palmer dan T.Clifton Morgan. *A Theory of Foreign Policy*. Princeton. Princeton University Press. 2006. Hlm 11

³⁰ Mark Webber dan Michael Smith. *Foreign Policy in Transformed World*. London. Prentice Hall. 2002. Hlm 9-10

negeri yaitu otoritas politik yang mengadopsi dan melaksanakan kebijakan luar negeri memiliki kontrol yang sangat terbatas atas hasilnya karena hasil yang didapat tergantung pada banyak variabel.³¹

Terkadang beberapa peneliti hanya menjelaskan mengenai proses dan faktor pendorong kebijakan luar negeri itu saja sehingga mengabaikan politik luar negeri itu sendiri. Maka dari itu dalam penelitian ini akan berfokus pada analisis kebijakan luar negeri dengan mengidentifikasi dan memahami kebijakan yang dibuat oleh suatu pemimpin negara. Dalam menjelaskan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Barack Obama dan Donald Trump, peneliti akan menggunakan instrumen yang dibuat oleh Jean-Frédéric Morin dan Jonathan Paquin yang mana mereka berfokus pada tiga instrumen dalam analisis kebijakan luar negeri. Instrumen sering digunakan sebagai laporan dalam variasi kebijakan luar negeri dari waktu ke waktu, domain dan ruang. Instrumen sendiri dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu Sosialisasi menargetkan pada pemeliharaan atau modifikasi gagasan. Koersif menargetkan pada pemeliharaan dan modifikasi kepentingan serta intervensi menargetkan pemeliharaan atau modifikasi pada struktur domestik negara asing.³² Adapun penjelasan lebih rinci mengenai instrumen dari Morin dan Paquin ialah sebagai berikut:³³

a. Sosialisasi

Instrumen yang pertama dalam kebijakan luar negeri menurut Morin dan Paquin ialah sosialisasi yang diartikan sebagai transfer atau pemindahan keyakinan, nilai serta gagasan dari satu aktor ke aktor lainnya. Melalui instrumen sosialisasi juga dapat membuat sebuah negara mengubah perilakunya. Dalam instrumen sosialisasi terdapat beberapa tindakan. Antara lain ialah komunikasi rasional yang menjadi salah satu cara untuk meyakinkan aktor lain agar ide yang dibawa mampu memberi validitas argumen pada suatu aktor sehingga dapat dimodifikasi kedalam ide aktor lain. Strategi

³¹ Jean-Frédéric Morin dan Jonathan Paquin. *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. Canada: Palgrave Macmillan. 2018. Hlm 6

³² Ibid. Jean-Frédéric Morin dan Jonathan Paquin Hlm 32

³³ Ibid. Jean-Frédéric Morin dan Jonathan Paquin. Hlm 32-38

lainnya ialah tindakan retorik yang dilakukan melalui pengungkapan serangkaian argumen untuk mencapai tujuan tertentu sehingga membuat aktor lain mengubah perilaku mereka. Diplomasi publik yang bertujuan untuk mengubah pikiran penduduk asing juga termasuk dalam strategi instrumen sosialisasi.

b. Koersif

Langkah-langkah dalam instrumen koersif dirancang untuk mempengaruhi bagaimana negara sasaran berperilaku dengan memodifikasi cara perhitungan kepentingannya tanpa campur tangan langsung di wilayahnya. Untuk membedakan instrumen koersif dapat melalui identifikasi sanksi yang diberikan, yaitu bersifat positif (strategi berbasis penghargaan) atau negatif (strategi berbasis hukuman). Instrumen koersif dapat dibedakan menurut tujuannya. *Dissuasion* merupakan bentuk paksaan yang bertujuan untuk mempertahankan status quo suatu negara sedangkan *compellence* adalah bentuk paksaan yang bertujuan mengubah perilaku pihak lawan.

c. Intervensi

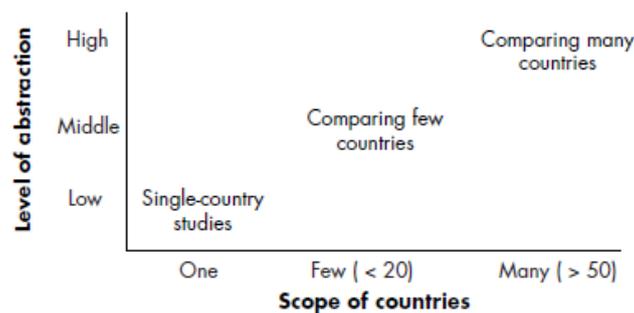
Kategori instrumen yang ketiga ialah intervensi dan dapat dibedakan lagi menjadi beberapa tipologi. Semua intervensi merupakan serbuan atau campur tangan dalam urusan internal suatu negara asing untuk membawa perubahan struktur. Terdapat dua jenis intervensi ialah intervensi politik dan intervensi militer. Intervensi politik menargetkan subversi dengan mendukung pemberontak, atau juga stabilisasi dengan mendukung kekuatan penguasa yang lemah. Sedangkan intervensi militer tidak selalu mengarah pada perang. Intervensi militer dapat mencakup bentrokan pebatasan, gerakan di wilayah asing, blokade maritim atau bahkan membunuh pemimpin politik.

Pada penelitian ini, teori kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump dalam isu nuklir Iran tahun 2009-2019. Penelitian ini menganalisis beberapa kebijakan dari kedua pemimpin Amerika tersebut dan kemudian diidentifikasi melalui instrumen yang dikemukakan oleh Jean-Frédéric Morin dan Jonathan Paquin sehingga dapat

dianalisis mengenai instrumen yang digunakan oleh Barack Obama dan Donald Trump dalam membuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait isu nuklir Iran.

2.2.2 Perbandingan Kebijakan Luar Negeri

Perbandingan kebijakan luar negeri merupakan bagian dari perbandingan politik. Tujuan dari perbandingan politik ialah proses untuk menggambarkan fenomena dan peristiwa politik suatu negara atau kelompok negara tertentu. Dalam studi perbandingan politik, terdapat tiga metode dalam membandingkan suatu negara, yaitu *many countries*, *few countries* dan *single-country*. Secara singkat, ketiga metode tersebut dapat dipahami melalui gambar di bawah ini:



Gambar 2. 1 Metode Perbandingan Politik

Sumber: Todd Landman. *Issue and Methods in Comparative Politics: An Introduction (Third edition)*. London. Routledge. 2008. Hlm 26

Berdasarkan metode tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan metode *single-country* dalam menganalisis perbandingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump dalam isu nuklir Iran. Metode *single-country* bertumpu pada tiga parameter yang berbeda namun tetap saling terkait yaitu waktu, ruang dan tingkat analisis. Parameter yang paling relevan dengan penelitian ini adalah waktu. Terdapat peningkatan jumlah pengamatan dengan membandingkan berbagai periode sejarah yang berbeda di suatu negara. Analisis komparatif dengan

menggunakan parameter waktu ini dapat membandingkan satu periode transformasi politik dengan periode lainnya.³⁴ Dengan cara tersebut maka dapat membantu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam menjelaskan suatu fenomena atau isu tertentu.

Membandingkan negara melalui analisis *single-country* dapat menggunakan berbagai aspek yang relevan. Misal demokrasi, tingkat pendapatan negara antar rezim, atau bahkan menggunakan kebijakan luar negeri suatu negara dengan membandingkan dua pemimpin negara tersebut. Dalam penelitian ini, analisis *single-country* berfokus pada perbandingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama dan Trump dalam isu nuklir Iran. Analisis kebijakan luar negeri bukan hanya untuk menggambarkan keputusan, perilaku dan hasil, namun juga mencakup mengenai pencarian untuk memahami keputusan tersebut dibuat, pilihan apa saja yang dipertimbangkan dan siapa atau apa saja yang dapat menjelaskan perilaku serta hasil.

Untuk membuat suatu analisis komparatif, mungkin akan banyak membahas mengenai perbandingan berbagai keputusan, perilaku dan hasil dari kebijakan luar negeri dan tentunya suatu perbandingan akan mempertimbangkan kerangka sebab akibat. Sama seperti apa yang sudah dijelaskan pada bagian teori kebijakan luar negeri, suatu kebijakan terdiri atas penyebab atau faktor yang berkontribusi pada berbagai pilihan kebijakan luar negeri dan efek yang merupakan sekumpulan opsi yang diperimbangkan, keputusan, perilaku dan hasil.³⁵

Dalam perbandingan kebijakan luar negeri, terdapat dua jenis perbandingan yaitu perbandingan N besar dan perbandingan N kecil. Dalam Hal ini, N merupakan notasi statistik untuk jumlah kasus. Dalam kasus perbandingan N besar, peneliti harus menggunakan metodologi statistik dengan memasukan semua informasi mengenai semua variabel dan biasanya tidak akan memuat perbedaan yang jelas antar variabel. Sedangkan untuk perbandingan N kecil memungkinkan untuk

³⁴Todd Landman. *Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction (Third edition)*. London. Routledge . 2008. Hlm 92

³⁵ Marijke Breuning. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. London. Palgrave Macmillan. 2007. Hlm 18

analisis yang lebih rinci tentang persamaan atau perbedaan variabel antar kategori yang akan dikomparasi. Ketika mempelajari lebih sedikit negara, maka akan semakin jelas variabel yang akan dibandingkan. Daripada menggunakan kategori atau indikator numerik untuk melakukan analisis terkait kebijakan tertentu, perbandingan N kecil yang menggunakan deskripsi dapat bernuansa dan akan lebih detail.³⁶

Pada penelitian ini menggunakan kerangka komparatif dan menggunakan metode *single-country* dalam membandingkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump. Penggunaan metode *single-country* dianggap relevan karena pada penelitian ini hanya membandingkan suatu kebijakan luar negeri dari satu negara yaitu Amerika Serikat. Untuk hasil komparasi dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Barack Obama dan Donald Trump terhadap isu nuklir Iran menggunakan aspek analisis kebijakan luar negeri dari Jean-Frédéric Morin dan Jonathan Paquin yang mana akan membandingkan instrumen yang digunakan dalam kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Barack Obama dan Donald Trump dalam isu nuklir Iran sehingga dalam penelitian ini akan berfokus pada variabel dependen atau kebijakan luar negeri itu sendiri.

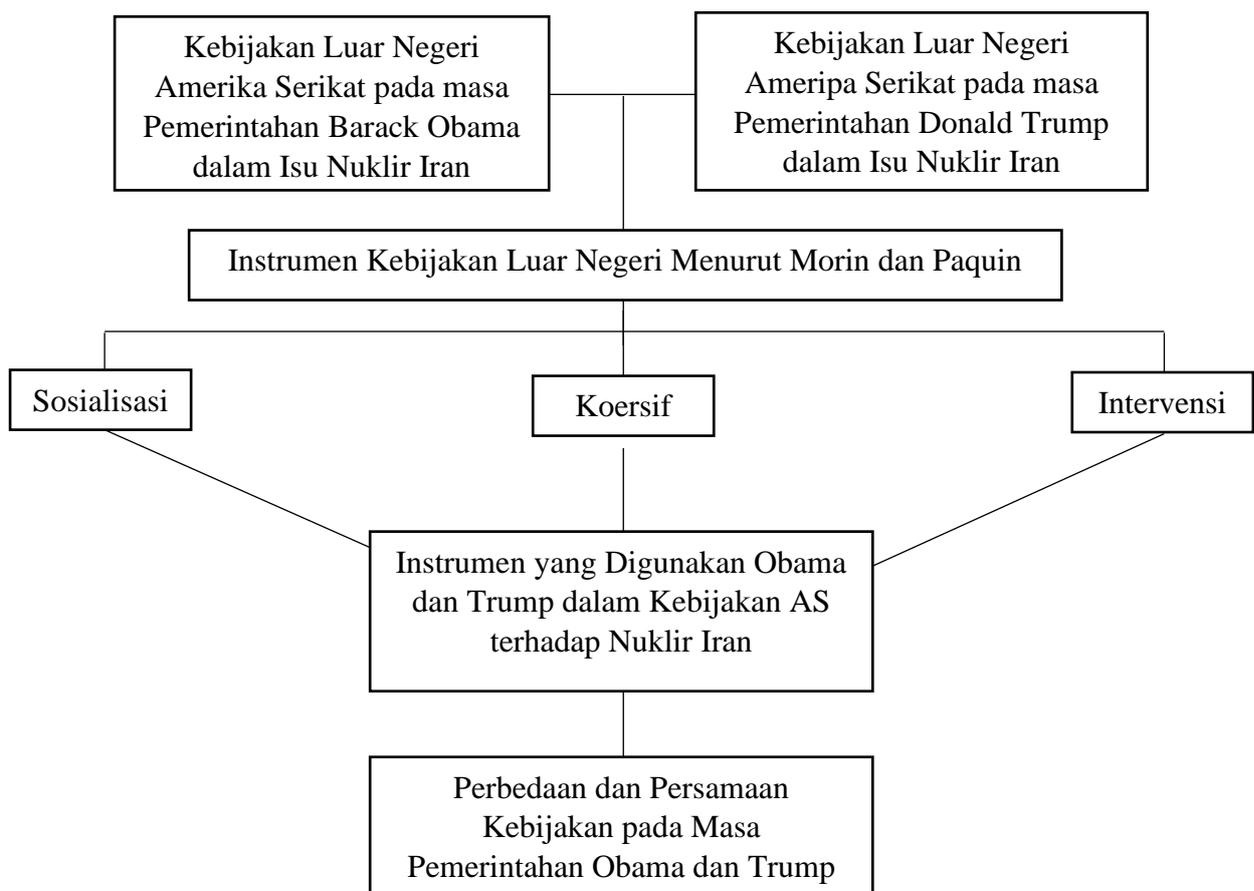
2.3 Kerangka Berpikir

Setelah diketahui bahwa Iran akan mengembangkan program nuklirnya, Amerika Serikat membuat berbagai kebijakan luar negeri untuk menekan Iran agar membatasi pengembangan program nuklirnya. Bertahun-tahun Amerika Serikat menerapkan sanksi ekonomi terhadap Iran, namun hal tersebut tidak membuat Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Memasuki era pemerintahan Presiden Obama, Amerika Serikat tetap mendesak Iran namun dengan cara-cara yang berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Perbedaan arah kebijakan luar negeri Obama berhasil membuat Amerika Serikat beserta Iran mencapai suatu

³⁶ Ibid. Marijke Breuning. Hlm 20

kesepakatan. Setelah masa kepemimpinan Obama digantikan oleh Trump, Amerika Serikat masih sepakat dengan kesepakatan tersebut. Namun tindakan Iran membuat Trump menerapkan kembali sanksi ekonomi dan menekan sekutunya untuk tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan Iran.

Dengan adanya perbedaan dan persamaan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump dalam isu nuklir Iran, maka dapat dibuat sebuah perbandingan antara keduanya. Untuk itu, teori kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Obama dan Trump dengan menjelaskan kebijakan tersebut melalui tolak ukur yang dibuat oleh Jean-Frédéric Morin dan Jonathan Paquin. Berikut ini merupakan gambar kerangka berpikir penelitian.



Gambar 2. 2 Bagan Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada riset perbandingan sejarah atau *historical comparative*. Penelitian *historical comparative* dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti data tentang suatu peristiwa dan kondisi di masa lalu sejarah atau dalam masyarakat berbeda.³⁷ Dalam penelitian ini, penulis memaparkan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan menganalisis perbandingan kebijakan luar negeri yang dibuat pada masa pemerintahan yang berbeda yaitu pada masa Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump dalam isu nuklir Iran.

Cresswell menyatakan bahwa sebuah penelitian kualitatif harus berfokus pada makna individual dan menerjemahkan kompleksitas sebuah situasi.³⁸ Salah satu ciri utama pendekatan kualitatif ialah memungkinkan kita untuk mengidentifikasi isu-isu dari perspektif partisipan penelitian kita, memahami makna dan interpretasi yang diberikan oleh perilaku, peristiwa dan objek.³⁹ Maka

³⁷ W. Lawrence Newman. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Seventh Edition)*. London. Pearson. 2014. Hlm 52

³⁸ John W. Cresswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California. Sage Publication. 2013. Hlm 4

³⁹ Monique Hennink, Inget Hutter dan Ajay Bailey. *Qualitative Research Methods*. London. Sage Publication Ltd. 2011. Hlm 9

dari itu, hasil dari deskripsi kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama dan Trump dalam isu nuklir Iran digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi instrumen yang digunakan oleh keduanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini berfokus pada deskripsi mengenai kebijakan yang dibuat oleh Obama dari awal masa jabatan hingga akhir masa jabatan keduanya serta deskripsi mengenai kebijakan yang dibuat oleh Trump dalam isu nuklir Iran. Kebijakan tersebut kemudian dijadikan data dan dianalisis menggunakan teori kebijakan luar negeri dengan berfokus pada instrumen yang dikemukakan oleh Morin dan Paquin. Perbandingan antar kebijakan dalam satu negara yaitu kebijakan yang dibuat oleh Obama dan Trump dalam isu nuklir Iran tahun 2009-2019 dibuat sebagai bentuk dari riset *historical comparative*.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump dalam isu nuklir Iran tahun 2009-2019 dan juga berfokus pada perbandingan antar kebijakan dua pemimpin Amerika Serikat tersebut. Adapun fokus mengenai kebijakan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama dan Trump dalam isu nuklir Iran dilihat menggunakan instrumen kebijakan luar negeri dari Morin dan Paquin.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder yang didapatkan berbentuk tertulis dan material tidak tertulis. Data yang dicari merupakan data mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump dari tahun 2009 sampai 2019. Data tersebut didapatkan melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal,

artikel, berita internasional dan beberapa website resmi pemerintah Amerika Serikat seperti *whitehouse.gov*, *state.gov*, dan *dod.defense.gov*

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dari studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan penelitian berbasis dokumen dan berbasis internet. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya dokumen resmi dari perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), dokumen UU Otorisasi Pertahanan Nasional Amerika Serikat Tahun Anggaran 2012 dan 2013, dokumen UU Iranian Transactions and Sanctions Regulations (ITSR) dan beberapa dokumen resmi lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis sekunder data kualitatif dengan menggunakan proses analisis data dari Miles dan Huberman. Analisis sekunder data kualitatif merupakan penggunaan data yang sudah ada untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang berbeda dari pertanyaan yang diajukan dalam penelitian asli.⁴⁰ Penggunaan analisis sekunder memungkinkan untuk memperoleh data tambahan atau untuk mengejar temuan yang muncul dari analisis awal.

⁴⁰ Ibid. Umar Suryadi. Hlm 200

Proses analisis data yang penulis gunakan ialah proses analisis data dari Miles dan Huberman. Menurutnya, terdapat tiga tahap dalam menganalisis data yaitu:⁴¹

a. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data yang muncul dalam himpunan catatan lapangan tertulis, transkrip atau dokumen dan materi empiris lainnya. Proses ini mengacu pada pemilihan data dari unit eksplanasi yang hanya mendeskripsikan dinamika isu nuklir Iran dari tahun 2009-2019 agar data tersebut lebih fokus dan sederhana. Begitu pula dengan deskripsi kebijakan yang dibuat oleh Obama dan Trump yang hanya memaparkan peristiwa penting di setiap tahunnya agar penjelasan tidak terlalu panjang.

b. Penyajian data

Secara umum, penyajian data dapat dikatakan sebagai *display* data dan berisi kumpulan informasi yang terorganisir serta terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Setelah adanya pemilihan data, maka penulis menyajikan data mengenai unit eksplanasi dan unit analisis di bagian hasil yang kemudian diikuti oleh penyajian mengenai analisis instrumen yang digunakan oleh Obama dan Trump dalam membuat kebijakan Amerika Serikat terhadap isu nuklir Iran.

c. Penarikan kesimpulan

Pada bagian ini, penulis memaparkan hasil dari perbandingan yang dilakukan, termasuk juga persamaan dan perbedaan antara kebijakan yang dibuat oleh Obama dan Trump beserta instrumen yang digunakan oleh keduanya.

⁴¹ Matthew B.Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd edition)*. California. Sage Publications. 2014. Hlm 31-32

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis paparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa inti dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dalam isu nuklir Iran ialah untuk membangun komunikasi awal sehingga dapat dilanjutkan untuk memulai negosiasi terkait program pengembangan nuklir Iran. Sejak awal pemerintahannya Obama terus mengupayakan cara agar Iran terlibat dalam dialog diplomatik bersama negara-negara P5+1. Selain itu, pada masa pemerintahan Obama juga banyak dibuat kebijakan yang berupa sanksi ekonomi untuk menekan Iran agar bisa memulai dialog bersama negara-negara P5+1.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Barack Obama dalam membangun komunikasi dengan Iran dilakukan agar ia bisa membahas program pengembangan nuklir Iran yang pada saat itu menjadi kekhawatiran masyarakat internasional. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama juga menggunakan instrumen yang beragam. Pada tahap awal Obama menggunakan komunikasi rasional dan pendekatan retorik untuk membangun kembali hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Iran. Kemudian, pada masa pemerintahannya yang pertama Obama belum mendapatkan hasil yang signifikan karena pihak Iran merasa skeptis atas penawaran P5+1 sehingga pada akhirnya ia memulai kebijakan luar negeri yang menggunakan instrumen koersif berupa strategi berbasis hukuman atau dengan menggunakan sanksi ekonomi. Setelah menerapkan sanksi dan melakukan negosiasi, akhirnya pada tahun 2013 ia berhasil meyakinkan Iran untuk bergabung dalam kesepakatan sementara. Kebijakan Obama dalam menyepakati JCPOA merupakan kebijakan yang menggunakan instrumen

koersif dengan menggunakan strategi berbasis penghargaan yang mana pada kasus ini ialah penangguhan sanksi apabila Iran menyepakati JCPOA.

Berbeda dengan Obama yang berusaha untuk memulai hubungan diplomatik dengan Iran, Trump justru menganggap bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam JCPOA merupakan kebijakan terburuk yang pernah ada. Pada saat awal masa kepemimpinannya, Trump terus berusaha untuk meminta kepada Kongres agar ia diberi kesempatan untuk memperbaiki kecacatan dalam JCPOA dan juga menambahkan beberapa kekurangan dalam kesepakatan tersebut. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump sangat didominasi oleh sanksi ekonomi. Hal tersebut bertujuan agar Iran dapat menghentikan program pengayaan uraniumnya dan juga sebagai respon dari beberapa tindakan Iran seperti uji coba rudal balistik. Selain itu juga Trump terus menggunakan mitranya di Timur Tengah untuk membantu Amerika Serikat dalam menanggukkan program nuklir Iran. Puncak dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap nuklir Iran ialah pada saat Amerika Serikat keluar dari JCPOA pada 8 Mei 2018.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump banyak menggunakan instrumen koersif dengan menempatkan sanksi ekonomi sebagai cara yang dapat menghentikan Iran. Berbagai sanksi dibuat oleh Trump dengan tujuan untuk melemahkan Iran secara finansial. Instrumen koersif digunakan oleh Trump untuk membuat sanksi dengan menargetkan elit tertentu agar dampak dari pengenaan sanksi tersebut dapat lebih efektif. Selain menggunakan strategi berbasis hukuman, Trump juga menggunakan diplomasi koersif yang merupakan salah satu bagian dari instrumen koersif. Trump mengancam akan membatalkan sertifikasi terhadap JCPOA apabila Kongres menolak untuk menambahkan beberapa poin baru dalam JCPOA. Hingga pada akhirnya ancaman tersebut dilakukan Trump dengan keluar dari JCPOA tanpa persetujuan dari mitra P5+1.

Terlepas dari persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh Obama dan Trump dalam merumuskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai kepentingan nasional yaitu

mengurangi intensitas Iran mengembangkan program nuklirnya atau bahkan menghentikan Iran dalam mengembangkan nuklirnya. Meskipun cara yang dipakai oleh Obama dan Trump cenderung berbeda namun keduanya tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pendahulunya dan terus mencapai tujuan Amerika Serikat dengan gaya kepemimpinan yang berbeda.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbandingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump dalam isu nuklir Iran maka saran yang dapat penulis berikan ialah yang pertama ditujukan untuk semua pihak yang membaca penelitian ini agar dapat lebih jeli ketika memberikan *statement* mengenai perbandingan dua objek. Perbandingan dengan tujuan untuk memaparkan objek mana yang lebih baik pun harus menggunakan parameter yang tepat. Ada beberapa objek yang tidak bisa dinilai keefektivasannya karena kedua objek tersebut membawa tujuan yang berbeda namun dengan cara yang sama atau bahkan sebaliknya. Misal pada penelitian ini, kebijakan Obama akan dinilai lebih baik bagi para pendukung Partai Demokrat namun sebaliknya Partai Demokrat akan menganggap bahwa kebijakan yang Trump lebih buruk. Padahal kedua pihak tersebut membawa tujuan yang sama namun dengan cara yang berbeda sehingga dalam kondisi tersebut perbandingan tidak dapat dilakukan dengan mengukur kebijakan mana yang lebih baik namun perbandingan dapat dilakukan dengan melihat aspek-aspek yang berbeda atau aspek-aspek yang sama dalam kebijakan Obama dan Trump. Selain itu, saran juga diberikan kepada peneliti selanjutnya agar dapat memberikan pemahaman yang berbeda dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Archive, T. W. (2017, Oktober). *President Trump Delivers Remarks on the Iran Strategy*. Diambil kembali dari Youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=-qmuTWRsNtU>
- Arms Control Association*. (2020, 12). Diambil kembali dari Timeline of Nuclear Diplomacy with Iran: <https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Nuclear-Diplomacy-With-Iran>
- B.Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd edition)*. California: Sage Publications.
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Journal of International Studies*. Vol 2. No.2, 109-115.
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Behrang, F. (2012). *U.S. Foreign Policy Interest and Iran's Nuclear Program*. Saskatoon: University of Saskatchewan.
- Black, I. (2009, Maret 20). *Barack Obama offers Iran 'new beginning' with video message*. Diambil kembali dari The Guardian:
<https://www.theguardian.com/world/2009/mar/20/barack-obama-video-iran>
- Blanton, S. L., & Kegley, C. W. (2016-2017 edition). *World Politics: Trend and Transformation*. Canada: Cengage Learning.
- Blinken, A. J., & Haines, A. (2017, Maret 27). *Dear Senators: Push Back Against Iran, but Not at the Expense of the Nuclear Deal*. Diambil kembali dari <https://foreignpolicy.com/2017/03/31/dear-senators-push-back-against-iran-but-not-at-the-expense-of-the-nuclear-deal/>
- Branda, O. E. (2018). Changes in the American Foreign Policy: From Obama to Trump. *International Conference Knowledge-Based Organization Vol. XXIV No.2*, 160-165.
- Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. London: Palgrave Macmillan.
- Castiglioni, C. (2013). Obama's Policy Toward Iran: Comparing First and Second Term. *Journal Analysis No. 220*, 1-12.
- Congress. (2009, Oktober 28). Diambil kembali dari H.R.2647 - National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2010:
<https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/2647>

- Coward, N. F., Contini, K., & A., D. (2018, Juni 28). *OFAC Revokes General Licenses for Parties Subject to US Jurisdiction to Engage in Iran-Related Business and Formally Establishes Wind-Down Periods*. Diambil kembali dari <https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/ofac-revokes-general-licenses-for-parties-subject-to-us-jurisdiction-to-engage-in-iran-related-business-and-formally-establishes-wind-down-periods/>
- Cresswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication.
- Davenport, K. (2017, Mei). *Senate Considers New Iran Sanctions*. Diambil kembali dari <https://www.armscontrol.org/act/2017-05/news/senate-considers-new-iran-sanctions>
- Deal, R. A. (2018). *All Is Not Quiet on the Western Front: Trump's Iran Policy and Europe's Choice on the Nuclear*. Italy: Istituto Affari Internazionali (IAI). Diambil kembali dari Research : <http://www.jstor.com/stable/resrep17537>>
- Dutta, A. (2019). Analysis of European Responses to Iran Nuclear Deal Crisis. *Indian Council of World Affairs: Issue Brief*.
- Esfandiary, D., & Finaud, M. (2016). The Iran Nuclear Deal: Distrust and Verify. Geneva Centre for Security Policy. *Jurnal No.18. Geneva Centre for Security Policy*.
- Esfandiary, D., & Finaud, M. (2016). The Iran Nuclear Deal: Distrust and Verify. *Geneva Papers*, 5-51.
- Glinksy, V. (2004). Iran Legal Paths to the Bomb. Dalam H. Sokolski, & P. Clawson, *Checking Iran's Nuclear Ambitions* (hal. 24). Non-proliferation Policy Education Center.
- Grier, P. (2009, Oktober 2). *It was Uncle Sam who first gave Iran nuclear equipment*. Diambil kembali dari The Christian Science Monitor: https://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2009/10_02/p04s01-usfp.html
- HAM, K. (t.thn.). Diambil kembali dari Deklarasi Universal Hak Asasi : [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2011). *Qualitative Research Methods*. London: Sage Publication Ltd.
- House, O. W. (2015). *JCPOA: What You Need Know About JCPOA*.
- House, T. W. (2013, November 23). *Statement by The President On First Step Agreement On Iran's Nuclear Program*. Diambil kembali dari <https://obamawhitehouse.archive>
- Huang, X. (2016). The Iranian Nuclear Issue and Regional Security: Dilemmas, Responses and the Future. *Jurnal dari Departement of Political Affairs, Middle East and West Asia Division*, 1-37.

- Hudson, V. M., & Day, B. S. (2020). *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Indonesia, B. (2010, Maret 20). *Obama Tawarkan Berdialog dengan Iran*. Diambil kembali dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/03/100320_ObamaIran
- Initiative, T. N. (2020, Juni). *Nuclear*. Diambil kembali dari <https://www.nti.org/learn/countries/Iran/nuclear/>
- Iranian Transactions and Sanctions Regulations*. (2018, Juni 27). Diambil kembali dari https://home.treasury.gov/system/files/126/fr83_30335.pdf
- Israel, T. o. (2018, April). *Full text of Netanyahu on Iran deal: '100,000 files right here prove they lied'*. Diambil kembali dari <https://www.timesofisrael.com/full-text-of-netanyahu-on-iran-deal-100000-files-right-here-prove-they-lied/>
- Israel, T. o. (2018, April 30). *Full text of Netanyahu on Iran deal: '100,000 files right here prove they lied'*. Diambil kembali dari <https://www.timesofisrael.com/full-text-of-netanyahu-on-iran-deal-100000-files-right-here-prove-they-lied/>
- Jin, L. (2010). Analysis on Obama Administration's Policy Adjustment of Iranian Nuclear Issue. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*. Vol. 4 No.2, 14-31.
- Joint Plan of Action*. (t.thn.). Diambil kembali dari https://www.armscontrol.org/files/Iran_P5_1_Nuclear_Deal_131123.pdf
- Kerr, P. K. (2019). *Iran's Nuclear Program: Status*. Washington: Congressional Research Service.
- Kerr, P. K. (2020). *Iran's Nuclear Program: Tehran;s Compliance with International Obligations*. Washington: Congressional Research Service.
- Khalaf, A. Z. (2020). American Attitude Towards Iran and It's Reflection on Iran Policy Towards the Arab Region. *Journal Departement of Political Science*.
- Khan, S. (2010). *Iran and Nuclear Weapons: Protracted Conflict and Proliferation*. New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- Kıbaroğlu, M. (2007). Iran's Nuclear Ambitions from a Historical Perspective and the Attitude of the West. *Middle Eastern Studies*, 43(2), 223-245.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Realties*. Thousand Oaks: Sage Publications Inc.
- Landman, T. (2008). *Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction (Third edition)*. London: Routledge.

- Maloney, S. (2016, Juni 11). *Tehran and Washington A Motionless Relationship?* Diambil kembali dari https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/11_Iran_maloney.pdf
- Mintz, A., & Jr, K. D. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Morin, J.-F., & Paquin, J. (2018). *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. Canada: Palgrave Macmillan.
- National Security Strategy* . (2010, Mei). Diambil kembali dari Obama White House: https://Obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
- Newman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Seventh Edition)*. London: pEARSON.
- NewsHour, P. (2018, Mei 9). *WATCH: Trump announces decision to withdraw from Iran nuclear deal*. Diambil kembali dari <https://www.youtube.com/watch?v=y86atuGoeuQ>
- Nikou, S. N. (2020, Januari 1). *Timeline of Iran's Nuclear Activities*. Diambil kembali dari United States Institute of Peace: <https://Iranprimer.usip.org/resource/timeline-Irans-nuclear-activities>
- Nuclear Threat Initiative*. (2017, 7). Diambil kembali dari Natanz Enrichment Complex: <https://www.nti.org/learn/facilities/170/>
- Obama, B. (2007, Juli). *Renewing American Leadership*. Diambil kembali dari Foreign Affairs: <https://www.foreignaffairs.com/articles/2007-07-01/renewing-american-leadership>
- Palmer, G., & Morgan, T. C. (2006). *A Theory of Foreign Policy*. Princeton: Princeton University Press.
- Paramasatya, S., & WIranto, S. (2019). Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). *Jurnal Hubungan Internasional*. Tahun XII, No.2, Juli - Desember.
- Perwita, Banyu, A. A., Ilham., M., & Razak. (2020). U.S. Foreign Policy Towards Iranian Nuclear Threat from Bill Clinton to Donald Trump Administration. *Insignia: Journal of International Relations*, Vol.7 No.1, 17-44.
- Ramesh, G., & Tsegaye, K. (2011, 12 30). *Research Gate*. Diambil kembali dari Iran's Nuclear Program: file:///C:/Users/ACER/Downloads/RAMESH_TSEGAYE-IRANS_NUCLEARPROGRAM1.pdf
- Remarks by the President on the Meeting of the P5+1 Regarding Iran*. (2009, Oktober 1). Diambil kembali dari U.S Mission to International Organization in Geneva: <https://geneva.usmission.gov/2009/10/01/president-p51/>

- Simpson, K. (2016). *U.S Nuclear Diplomacy with Iran: From the War on Terror to the Obama Administration*. New York: Rowman and Littlefield.
- State, U. D. (2012). *Fact Sheet: Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012*. Diambil kembali dari <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/208111.pdf>
- State, U. D. (2012). *Section 1245 of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012*.
- Sterio, M. (2016). President Obama's Legacy: The Iran Nuclear Agreement? *Case Western Reserve Journal of International Law*, Vol.48, No.1, 69-84.
- Tempo*. (2008, Agustus 26). Diambil kembali dari Obama: Harus Menekan Iran atau Israel Bertindak: <https://dunia.tempo.co/read/132338/Obama-dunia-harus-menekan-Iran-atau-israel-bertindak/full&view=ok>
- Treasury, D. o. (2018, November 5). *Iranian Transactions and Sanctions Regulations*. Diambil kembali dari https://home.treasury.gov/system/files/126/fr83_55269.pdf
- Tur., K. (2016). *Donald Trump Weighs in on Iran Deal*. Diambil kembali dari NBC News: nbcnews.com/politics/2016-election/donald-trump-weighs-iran-deal-n391926
- Vaez, A., & Sadjadpour, K. (2013). *Iran's Nuclear Odyssey: Cost and Risk*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.
- Webber, M., & Michael, S. (2002). *Foreign Policy in Transformed World*. London: Prentice Hall.
- Weisman, S. R., & Fathi, N. (2006, Januari 11). *Iranians Reopen Nuclear Centers*. Diambil kembali dari New York Times: <https://www.nytimes.com/2006/01/11/world/middleeast/Iranians-reopen-nuclear-centers.html>
- White House*. (2017, 10 13). Diambil kembali dari Remarks by President Trump on Iran Strategy: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-iran-strategy/>
- Widagdo, S., & Widhiyanti, H. (2008). *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Malang: Bayu Media Publishing.